



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

RENCANA **STRATEGIS** 2020 - 2024

Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang



**Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut**



RENCANA **STRATEGIS** 2020 - 2024

Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang



**Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut**

Rencana Strategis Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang

Kepala Loka PSPL Serang : Syarif Iwan Taruna Alkadrie

Pelaksana Urusan Program dan Evaluasi : Hendra Nurcahyo

Pelaksana Urusan Pendayagunaan dan Pelestarian : Anhar Muslim

Pelaksana Urusan Tata Usaha : Wiara Marup



Jl. Raya Carita Km 4,5 Caringin Labuan, Caringin, Pandeglang,
Kabupaten Pandeglang, Banten 42264

Lembar Pengesahan

Rencana Strategis

Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang 2020 – 2024

Yang mengesahkan

Kepala Loka PSPL Serang



Syarif Iwan Taruna Alkadrie

Tanggal pengesahan

27 Desember 2021

DAFTAR ISI

iii

Kata Pengantar

1

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Kondisi Umum

28

Bab II Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis

- a. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan
- b. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan
- c. Sasaran

33

Bab III Arah Kebijakan, Strategi Pelaksanaan, Dan Kerangka Kelembagaan

- a. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
- b. Strategi Pelaksanaan Kegiatan LPSPL Serang
- c. Kerangka Kelembagaan

39

Bab IV Indikator Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

- a. Indikator Kinerja 2020-2024
- b. Kerangka Pendanaan

46

Bab V Penutup

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis LPSPL Serang tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

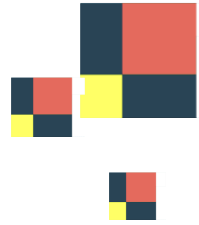
Penyusunan Rencana Strategis LPSPL Serang tahun 2020-2024 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-Kp/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Semoga Rencana Strategis LPSPL Serang tahun 2020-2024 ini dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan manajemen dan pelaksanaan kegiatan teknis lainnya bagi Unit Pelaksana Teknis Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang dalam mewujudkan sumberdaya laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang tertata, produktif, dan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Kepala Loka PSPL Serang,



Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Selanjutnya telah ditetapkan pula Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang

Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang, menyusun Renstra LPSPL Serang Tahun 2020-2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

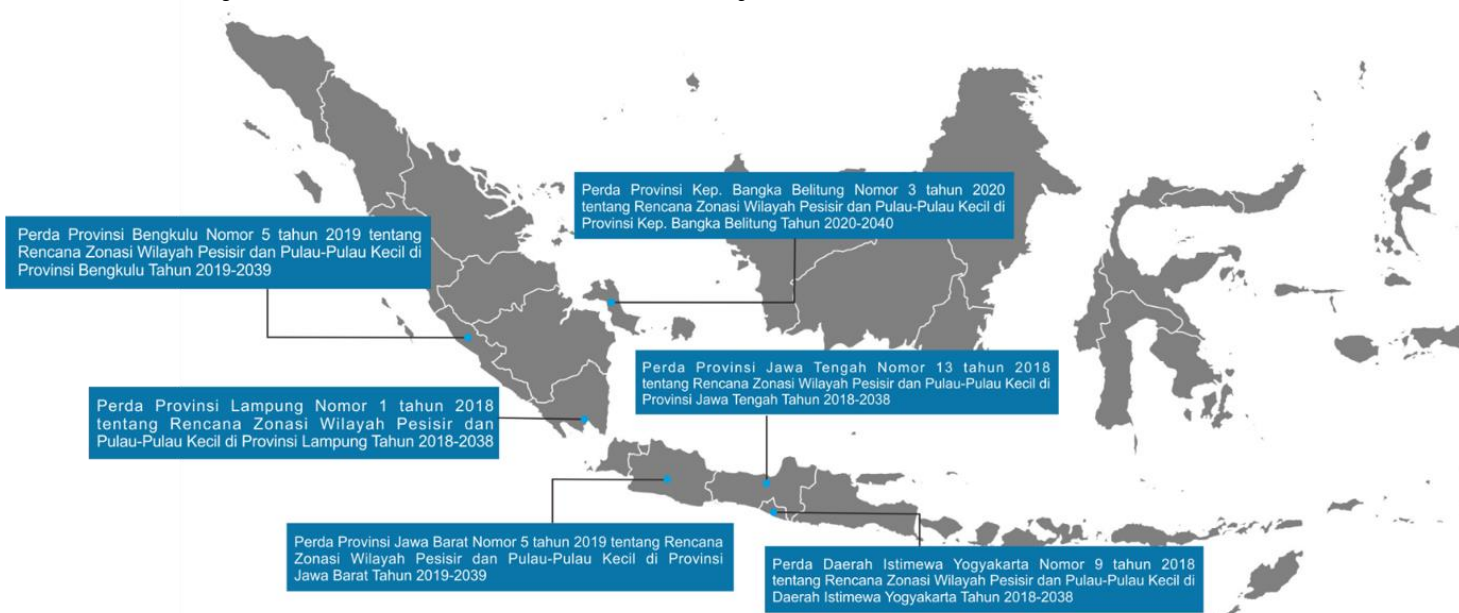
B. Kondisi Umum

Secara garis besar, target Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik bahkan beberapa IKU melebihi target yang telah ditetapkan, seperti jumlah jenis ikan yang dilayani perizinan di wilayah kerja LPSPL Serang (Jenis). Meskipun banyak hambatan dalam pelaksanaan kegiatan seperti faktor eksternal, seperti faktor cuaca dan kondisi alam, meskipun telah diprediksi dengan asumsi faktor tersebut tidak berubah secara drastis dan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dengan memasukkan unsur mitigasi kondisi alam.

1. Perencanaan Ruang Laut

Pendampingan Perencanaan Ruang Laut sebagai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau. Dalam

hal tersebut pemerintah daerah wajib menyusun RZWP3K yang menjadi dasar pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. LPSPL Serang berperan dalam melakukan pendampingan penyusunan RZWP3K di 8 (delapan) Provinsi wilayah kerja LPSPL Serang, dan telah sukses mendampingi penyusunan Peraturan Daerah RZWP3K di 6 (enam) Provinsi di wilayah kerja, yaitu Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendampingan LPSPL Serang dalam penetapan dokumen RZWP3K menjadi Peraturan Daerah diantaranya:



1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;

4. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038;
5. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039;
6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038.

Selain itu LPSPL Serang juga aktif terlibat dalam penyusunan zonasi antar wilayah perairan laut provinsi dan Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), antara lain:

1. RZ Kawasan Antarwilayah (KAW) Laut Barat Sumatera;
2. RZ KSN Selat Sunda;
3. RZ KSNT Klaster Banten;
4. RZ KSNT Pulau Fani, Budd, Mega dan Enggano;
5. RZ KSNT Pulau Nusamanuk dan Pulau Batu Kolotok (Klaster Jawa Barat).

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendelegasikan 3 Peraturan Pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi 2 menjadi 1 Permen KP.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi dari 15 menjadi 3 Permen KP.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, amanah dari Peraturan Pemerintah ini disimplifikasi dari 40 menjadi 19 Permen KP.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi di Dit. Perencanaan Ruang Laut yang memberikan mandat, antara lain:

- a. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- b. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- c. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
- d. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- e. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- f. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terkait integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi Tahun Anggaran 2022, dengan tenggang waktu penyelesaian integrasi antara 18-24 Bulan. Untuk mencapai target tenggang waktu yang diberikan keterlibatan UPT sangat dibutuhkan. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja mengatur proses bisnis berusaha dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha berbasis Resiko, dimana Direktorat Perencanaan Ruang Laut memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebelum persetujuan lingkungan diberikan dan bersama provinsi, UPT DJPRL mengidentifikasi serta inventarisasi pemanfaatan dan perizinan kegiatan eksisting di perairan pesisir.

2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja LPSPL Serang

Dalam menunjang pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati laut, LPSPL Serang telah melakukan berbagai kegiatan dalam pengelolaan jenis ikan dilindungi, pengelolaan kawasan konservasi serta kemitraan konservasi di wilayah kerja LPSPL Serang. Pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

a. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu karang.

Pengelolaan terumbu karang berupa pelaksanaan kegiatan transplantasi karang. Transplantasi karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi ekosistem terumbu karang karena adanya kerusakan pada ekosistem target dengan kondisi yang semakin terdegradasi dan dilakukan melalui pencangkakan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru.

Transplantasi karang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan yaitu untuk:

1. pemulihan kembali terumbu karang yang telah rusak;
2. pemanfaatan terumbu karang secara lestari (perdagangan karang hias);
3. perluasan terumbu karang;
4. tujuan pariwisata;
5. meningkatkan kepedulian masyarakat akan status terumbu karang; tujuan perikanan;
6. terumbu karang buatan;
7. tujuan penelitian.

Kegiatan transplantasi di wilayah kerja LPSPL Serang dilakukan pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 sebagaimana pada data gambar berikut:

TRANSPLANTASI KARANG

Metode yang digunakan adalah *Aseksual Fragmentasi* menggunakan Substrat semen dan semen berpipa dan rak besi behel ukuran 100 cm X 100 cm X 50 cm

Data pelaksanaan transplantasi karang pada LPSPL Serang dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 dengan data lokasi pelaksanaan pada tabel.

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi	2013	2014	2015	2016
1	Kota Bengkulu	Pulau Tikus		√		
2	Belitung	Tanjung Kelayang				√
3	Belitung	Pulau Mendanau				√
4	Pesawaran	Pulau Pahawang			√	
5	Pandeglang	Pulau Liwungan		√	√	
6	Pandeglang	Pulau Popole			√	
7	Pandeglang	Karang Kaboa			√	
8	Pandeglang	Tanjung Lesung			√	
9	Serang	Pulau Semut		√		
10	Lebak	Binuangun	√	√		
11	Jepara	Pulau Panjang		√	√	

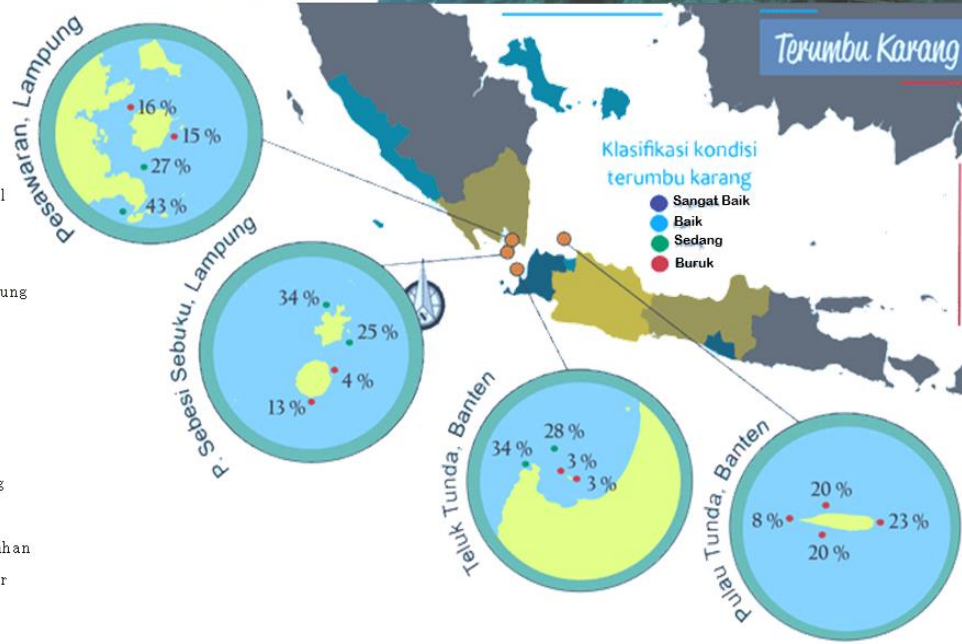
Guna mendukung rehabilitasi ekosistem terumbu karang, LPSPL Serang juga melaksanakan monitoring ekosistem terumbu karang dengan menggunakan metode *transect permanent*. Metode ini diharapkan dapat menjadi data series untuk melihat perubahan dan perkembangan ekosistem terumbu karang di lokasi target. Kegiatan monitoring dilaksanakan di 4 (empat) stasiun yaitu Pulau Tunda, Pesawaran, Sebesi-Sebuku, dan Teluk Lada. Monitoring dilaksanakan pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.



IDENTIFIKASI DAN MONITORING TERUMBU KARANG

Pada lokasi studi dipasang transek permanen berupa transek garis di 2 (dua) kedalaman yaitu 4 meter dan 8 meter di setiap stasiun. Sejak tahun 2016, transek permanen telah dipasang di 4 lokasi yaitu:

- 1) Situs Pulau Tunda, Banten
 - a) Stasiun Tunda Barat
 - b) Stasiun Tunda Utara
 - c) Stasiun Tunda Timur
 - d) Stasiun Tunda Selatan
- 2) Situs Pesawaran, Lampung
 - a) Stasiun Maldive Spot
 - b) Stasiun Pahawang Kecil
 - c) Stasiun Jelarangan
 - d) Stasiun Tanjung Putus
- 3) Situs Sebesi-Sebuku, Lampung
 - a) Stasiun Teluk Bangkai
 - b) Stasiun Geligi
 - c) Stasiun Umang
 - d) Stasiun Sianas
- 4) Situs Teluk Lada, Banten
 - a) Stasiun Tanjung Lesung
 - b) Stasiun Karang Gundul
 - c) Stasiun Karang Pamecahan
 - d) Stasiun Liwungan Timur



b. Pendataan Pendaratan Hiu dan Pari

Pengelolaan Hiu dan Pari dilaksanakan dengan kegiatan pendataan dengan menempatkan petugas enumerator di lokasi target. Kegiatan pendataan Hiu dan Pari di wilayah kerja LPSPL Serang dilaksanakan pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2020.

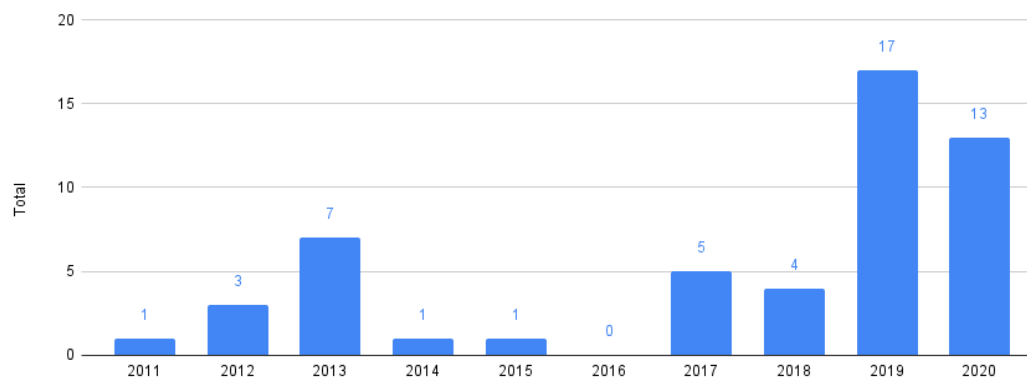
NO	LOKASI	KAB/KOTA	2013	2014	2015	2020
1	Babel 1	Babel 1		Jul-Sep		
2	Babel 2	Babel 2		Jul-Sep		
3	Babel 3	Babel 3		Jul- Sep		
4	Pulau Baai	Kota Bengkulu		Jul-Sep		
5	Tanjung	Kota Bengkulu			Feb-Okt	
6	Pasar Bawah Manna	Bengkulu Selatan		Jul-Sep		
7	Pasar Lama Bintuhan	Kaur		Jul- Sep		
8	Labuan Maringgai	Lampung Timur	Agu-Okt	Jul-Sep		
9	Gudang Lelang	Kota Band. Lampung		Jul-Sep		
10	Bom	Lampung Selatan	Agu-Okt	Jul- Sep		
11	Bakauheuni	Lampung Selatan			Feb-Okt	
12	Binuangeun	Lebak	Agu-Okt			
13	Muara Angke	Jakarta Utara	Agu-Okt			Feb- Des
14	Muara Baru	Jakarta Utara	Agu-Okt			Feb -Des
15	Pelabuhanratu	Sukabumi	Agu-Okt			

16	Indramayu	Indramayu			Feb-Okt	
17	Tegal	Tegalsari		Jul- Sep		
18	Pekalongan	Pekalongan	Agu-Okt			
19	Semarang	Semarang	Agu-Okt	Jul- Sep		
20	Cilacap	Cilacap	Agu-Okt	Jul- Sep	Feb-Okt	
21	Kulonprogo	Kulonprogo		Jul- Sep		
22	Bantul	Bantul		Jul- Sep		
23	Gunungkidul	Gunungkidul		Jul- Sep		
24	PPP Bajomulyo	Pati				Feb- Des

c. Penanganan biota laut dilindungi

Penanganan biota laut dilindungi terutama mamalia laut terdampar merupakan salah satu tugas LPSPL Serang. Terdapat jejaring penanganan mamalia laut terdampar yang telah mendapatkan bimbingan teknis, yang dibentuk dengan pihak terkait di lingkup wilayah kerja LPSPL Serang. Jejaring tersebut memudahkan koordinasi dan mempercepat proses penanganan mamalia laut terdampar. Dalam kurun waktu 2015-2020, telah dilakukan penanganan mamalia terdampar sebanyak 40 (empat puluh) kasus baik oleh LPSPL Serang maupun oleh jejaring di wilayah kerja LPSPL Serang.

Frekuensi Penanganan Hiu Paus dan Mamalia Laut Terdampar



d. Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi / Appendiks CITES

LPSPL melaksanakan kegiatan pelayanan dalam rangka pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES. Selama kurun waktu 2015-2020, telah dilakukan penerbitan

dokumen rekomendasi perdagangan hiu dan pari sebanyak 9.997 dokumen.

Tabel Jumlah Produk Hiu Tahun 2014 – Tahun 2019 (Kg)

No	Jenis Produk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Hiu Hidup	0	91,5	702,1	8.325,02	6.548,25	5.346,83	21.013,70
2	Daging Hiu	0	952.487,35	1.544.473,53	7.069.105,16	8.592.003,20	7.262.669,79	25.420.739,03
3	Sirip Hiu	3.484,50	288.634,57	786.081,22	1.329.557,25	556.524,13	386.586,41	3.350.868,08
4	Tulang Hiu	0	77.178,20	246.926,00	150.006,78	182.022,81	84786,69	740.920,48
5	Jebreng	0	664	3.012,00	840	0	0,00	4.516,00
6	Minyak Hiu	0	50	0	0	0	0,00	50,00
7	Kulit Hiu	0	3.155,00	18.539,00	63.014,92	169.572,20	114722,5	369.003,62
Total Produksi Hiu		3.484,50	1.322.260,62	2.599.733,85	8.620.849,13	9.506.670,59	7.854.112,22	29.907.110,91

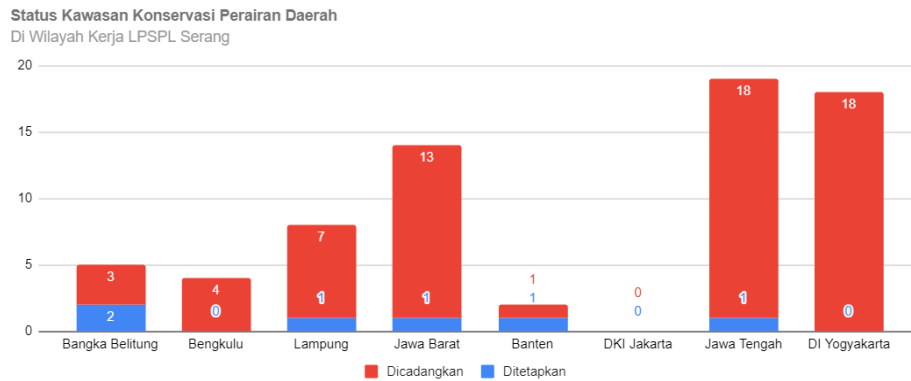
Tabel Jumlah Produk Pari Tahun 2014 – Tahun 2019 (Kg)

No	Jenis Produk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Pari Hidup				5.856,02	4.797,55	29.115,4	39.768,97
2	Daging Pari	0	228.655,00	405.075,00	1.239.493,59	2.482.517,96	2.174.350,2	6.530.091,75
3	Insang Pari	0	0	2.045,00	46.637,50	47.276,33	0,00	95.958,83
4	Kulit Pari Basah	0	18.995,00	80.844,74	84.667,15	115.770,55	0,00	300.277,44
5	Kulit Pari Kering	400	24.360,00	72.851,00	72.949,61	58.950,00	53.848,43	283.359,04
Total Produksi Pari		400,00	272.010,00	560.815,74	1.449.603,87	2.709.312,39	2.257.314,03	7.249.456,03

e. Pengelolaan Kawasan Konservasi

LPSPL Serang berperan aktif dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan konservasi adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Penetapan Kawasan konservasi perairan merupakan salah satu upaya konservasi ekosistem dengan memperhatikan kriteria ekologis, sosial budaya dan ekonomis. Pencadangan kawasan konservasi bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Hingga tahun 2020 pada wilayah kerja LPSPL Serang sudah terdapat 6

(enam) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta 14 (empat belas) usulan KKPD yang telah dicadangkan (Sumber: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2020).



f. Kemitraan Konservasi

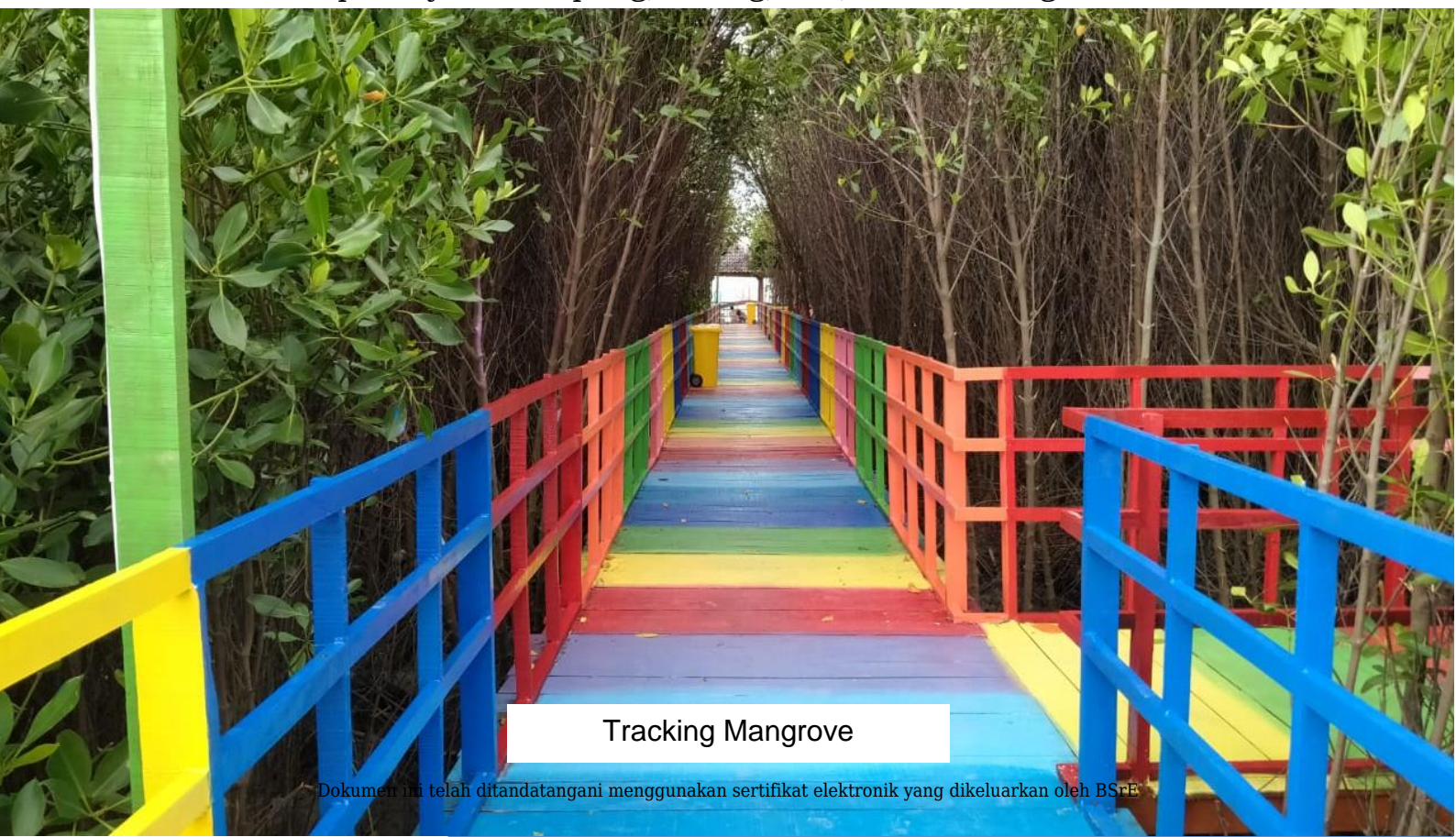
LPSPL Serang telah memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan jenis ikan dilindungi ini melalui bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK). Bentuk bantuan yang diberikan berupa sarana seperti peralatan pengawasan jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi, bahan rehabilitasi habitat dan sebagainya. Dalam hal ini, LPSPL Serang telah menyalurkan bantuan konservasi kepada 7 (tujuh) kelompok pada tahun 2018 dan 3 (tiga) kelompok pada tahun 2019 dan 1 (satu) Kelompok pada tahun 2020.



3. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan LPSPL Serang terkait pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain:

- 1) Pendampingan Pengelolaan Bantuan Sarana dan Prasarana di Pulau-pulau Kecil Terluar (2015) di Pulau Betuah.
- 2) Penanaman mangrove seluas 40 Hektar di 1 Kabupaten (2016) di Kabupaten Lampung Timur dan Pondok Informasi Mangrove tahun 2016 di Desa Domas Kabupaten Serang 1 unit.
- 3) Bantuan sarana pengendalian pencemaran di wilayah pesisir (2017) berupa 3 (tiga) paket sarana pengolah sampah di 3 Kabupaten yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Pandeglang
- 4) Fasilitasi Sarpras Ekonomi Produktif Pulau Terluar tahun 2018 yaitu wilayah P. Nusa Kambangan, Kampung Laut, Cilacap.
- 5) Bantuan sarana prasarana pesisir dan pulau-pulau kecil (2019) berupa (bantuan perahu dan mesin ketinting sebanyak 6 (enam) paket untuk 6 kelompok di Way Muli Lampung Selatan.
- 6) Penanaman mangrove serta seluas 97,87 Hektar di 4 Kabupaten (2020) di Lampung Timur, Pesawaran, Kabupaten Brebes, dan Karawang; Tracking mangrove sebanyak 4 (empat) paket di 4 Kabupaten yaitu Lampung, Serang, Pati, dan Rembang.



Tracking Mangrove

KONDISI VEGETASI 2016

Kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan pada tahun 2016 bersama dengan kelompok masyarakat. Kondisi lahan yang berlumpur mengakibatkan sulitnya akses untuk bergerak.

2018

Monitoring penanaman mangrove.

Monitoring dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember 2018 dengan menggunakan *drone* dan pemantauan langsung kondisi habitat mangrove baru dengan berbagai jenis organisme.

Berdasarkan hasil gambar *drone* menunjukkan tutupan mangrove sebesar 100% pada lokasi yang ditanami mangrove. Jenis yang tumbuh terdapat jenis *Rhizophora sp.* dan *Avicenia sp.* Pada bagian ke arah darat juga terlihat tutupan cemara laut yang lebih tinggi dari tutupan mangrove sekitar. Hal ini menunjukkan komposisi susunan penanaman cemara laut dan mangrove berhasil dilakukan.

Masyarakat setempat menyatakan bahwa kawasan tersebut jika dikelola akan dapat menjadi pusat wisata mangrove di lampung sebagaimana tujuan penanaman mangrove tersebut dilaksanakan.



PONDOK INFORMASI SERANG

Selain bantuan vegetasi pantai di Lampung, 2016, diberikan juga satu unit Pondok Informasi yang terletak di Desa Domas, Kabupaten Serang dan masih beroperasi dengan baik dan sudah dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi, pertemuan, maupun lokasi sekitar sebagai pusat pembibitan mangrove.



FASILITASI SARPRAS EKONOMI PRODUKTIF

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Identifikasi potensi, Pendampingan Pengelolaan Sarpras, Fasilitasi Sarpras Ekonomi Produktif Pulau Nusa Kambangan pada tahun 2018. Pada waktu penyerahan juga dilaksanakan pelatihan kepada anggota kelompok mengenai pemanfaatan potensi kelautan di Kampung Laut tersebut.



4. Pemanfaatan Jasa Kelautan

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat, LPSPL Serang melakukan upaya melalui kegiatan integrasi lahan garam seluas 16,7 Hektar di Kabupaten Serang pada tahun 2019, serta bantuan sarana berupa rumah tunnel garam pada tahun 2019 sebanyak 36 unit di Kabupaten Kebumen dan 25 unit di Kabupaten Bantul, serta pada tahun 2020 di Kabupaten Kebumen, Cilacap dan Gunungkidul dengan jumlah masing-masing sebanyak 40 unit.



Pada tahun 2019, LPSPL Serang melaksanakan kegiatan integrasi lahan pegaraman yang bertujuan untuk meningkatkan produksi garam dengan memanfaatkan teknologi di bidang garam. Lokasi kegiatan terletak di Desa Domas.



Pada tahun 2020, LPSPL Serang melaksanakan kegiatan peningkatan produksi garam melalui penyerahan bantuan tunnel garam di Kebumen, Cilacap dan Gunungkidul.

4. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai lebih kurang 17.508 pulau (Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia) dimana sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “services” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang sebesar 438.712,4 Ha Dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis

karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerrang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun sebesar 52.194,9 Ha Dengan keanekaragaman jenis mencapai ±11 jenis lamun dari 13 jenis yang terdapat di Indonesia.

Tujuan dibentuknya LPSPL Serang adalah melakukan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja yaitu di Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Delapan provinsi wilayah kerja LPSPL Serang memiliki potensi yang sangat luar biasa.

1. Perencanaan Ruang Laut

Penyusunan RZWP3K di wilayah kerja LPSPL Serang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) provinsi RZWP3K dengan Peraturan Gubernur dari total 8 provinsi. Dua provinsi masih belum ditetapkan dokumen RZWP3K yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

2. Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut

- a. Target jenis prioritas pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah kerja LPSPL Serang meliputi jenis penyu, sidat, teripang, hiu, pari dan mamalia laut (paus, dugong) serta karang.
- b. Pendataan penyu saat ini masih perlu dilakukan untuk mendata lokasi peneluran penyu serta fasilitasi perlindungan dan pengelolaan penyu berupa pembangunan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan konservasi penyu.
- c. Pendataan pendaratan Hiu dan Pari.
- d. Pelayanan pemanfaatan Sidat, Teripang, Hiu dan Pari.
- e. Letak Indonesia yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*), menjadikan Indonesia dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu

karang dunia. Sebanyak sekitar 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 genus karang dijumpai di Indonesia. Dalam hal mendata kondisi ekosistem terumbu karang perlu dilaksanakan pendataan berupa data series tahunan.

- f. Pemanfaatan terumbu karang dari hasil transplantasi dapat mendukung konservasi pengelolaan terumbu karang dengan pembuatan *coral stock center* karang.
- g. Pelaksanaan rehabilitasi terumbu karang di lokasi status buruk. Berdasarkan data LIPI 2019, masih terdapat beberapa lokasi Ekosistem Terumbu Karang yang rusak dengan data 11,43% potensi terumbu karang sangat baik 28,57% berpotensi baik, 30,20% berpotensi cukup, dan 28,98% berpotensi buruk (Hadi, T. dkk 2019 - LIPI)

Tabel potensi terumbu karang 2019.

No	Provinsi	Lokasi	Jumlah Stasiun	Sangat Baik	Baik	Cukup	Buruk
1.	Bengkulu	Enggano	12	0	1	3	8
2.		P. Tikus	3	0	0	3	0
3.		Kaur	7	0	1	1	3
4.	Lampung Barat	Pulau Pisang	14	5	5	4	0
5.		Teluk Ratai	4	1	2	0	1
6.		Bakauheni	10	0	2	3	5
7.		Teluk Lampung	18	5	8	3	2
8.		Krakatau	8	0	1	5	2
9.	Bangka Belitung	Bangka	10	1	3	3	3
10.		Belitung	11	0	2	7	2
11.		Belitung Timur	10	0	7	3	0
12.	Banten	Merak	5	0	0	1	4
13.		Ujung Kulon	16	0	1	6	9
14.		Teluk Banten	4	0	4	0	0
15.	DKI	Kepulauan	52	0	16	12	24
16.	Jawa	Indramayu	10	6	1	2	1
17.	Jawa Tengah	Nusakambangan	3	0	0	1	2
18.		Jepara	7	0	1	3	3
19.		Karimun Jawa	38	10	15	12	1
20.	DIY	Pantai Wediombo Gunung Kidul	3	0	0	2	1
Total			245	28	70	74	71
Persentase				11,43	28,57	30,20	28,98

h. Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Serang diperlukan dorongan untuk dilakukan pengelolaan. Data dan Status Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Serang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Provinsi	Ditetapkan MPK	Dicadangkan
Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> KKPD Gugusan Pulau-Pulau Momparang (124.320,7 Ha) (KEPMENKP Nomor 52/KEPMEN-KP/2017) KKPD Belitung (391.820,23 Ha) (KEPMENKP Nomor 94/KEPMEN-KP/2020) 	<ol style="list-style-type: none"> KKPD Suaka Perikanan Tuing-Bangka (7.372,5 Ha) KKPD Bangka Selatan (92.511,9 Ha) KKPD Bangka Tengah (11.357,9 Ha) <p>(PERDA Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020)</p>
Bengkulu		<ol style="list-style-type: none"> KKPD Kaur (Linau, Merpas, dan Sekunyit) (29.839,81 Ha) KKPD Mukomuko (10.497,54 Ha) KKPD Enggano - Bengkulu Utara (43.087,93 Ha) Pulau Tikus (1.661,77 Ha) <p>(PERDA Prov. Kep. Bengkulu Nomor 3 Tahun 2020)</p>
Lampung	<ol style="list-style-type: none"> KKPD Teluk Kiluan (72.211,68 Ha) (KEPMENKP Nomor 49/KEPMEN-KP/2019) 	<ol style="list-style-type: none"> KKPD Ngambur dan Betuah - Lampung Barat (56.903,17 Ha) KKPD Pulau Batang Segama - Lampung Timur (51.623,1 Ha) KKP Way Kambas (60.397,21 Ha) Lampung Selatan (10.215,27 Ha) Bandar Lampung KKP3K-TP-11 (211,58 Ha) Bandar Lampung KKP3K-TPM (1.802,08 Ha) Pesawaran (523,12 Ha) <p>(PERDA Prov. Lampung Nomor 1 Tahun 2018)</p>

Provinsi	Ditetapkan MPK	Dicadangkan
Banten	1. KKM HMAS Perth (99,94 Ha) (KEPMENKP Nomor 21/KEPMEN-KP/2018)	1. KKPD Pandeglang (7.391 Ha) (KEPBUP Pandeglang Nomor 660/Kep.369-Huk/2007)
DKI Jakarta	-	-
Jawa Barat	1. KKPD Pantai Penyu Pangumbahan (2.706,09 Ha) (KEPMENKP Nomor 5/KEPMEN-KP/2016)	1. KKPD Pulau Biawak – Indramayu (54.847,49 Ha) 2. KKPD Pangandaran (38.854,67 Ha) 3. Karang Temiyang (100,1 Ha) 4. Karang Sendulang (100,1 Ha) 5. Karang Kapalan (100,1 Ha) 6. Karang Bui (100,15 Ha) 7. Suaka Alam Perairan Blanakan (375,83 Ha) 8. Suaka Alam Perairan Eretan (151,09 Ha) 9. KK Mangrove Ciemas (87,13 Ha) 10. KK Mangrove Cibitung (301,33 Ha) 11. Suaka Pulau Kecil Geopark Ciletuh (64,74 Ha) 12. KK Mangrove Muara Gembong (4.319,32 Ha) 13. Suaka Pesisir Pamayang (104,895 Ha) (PERDA Prov. Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019)
Jawa Tengah	1. KKPD Ujungnegoro Roban (4.015,2 Ha) (KEPMENKP Nomor 29/MEN/2012)	1. Karang Jeruk (238,162 Ha) 2. Taman Kecil Pulau Panjang (496,701 Ha) 3. Segara Anakan (1.730,58 Ha) 4. Pendaratan Penyu (234,601 Ha) 5. Pendaratan Penyu (688,229 Ha) 6. Pendaratan Penyu (547,754 Ha) 7. Karang Sugali (1.083,891 Ha) 8. Karang Korowelang (299,86 Ha) 9. Rajungan Betah Walang (244,979 Ha)

Provinsi	Ditetapkan MPK	Dicadangkan
		10. Pulau Bokor (81,379 Ha) 11. TP Teluk Awur (573,31 Ha) 12. Taman Pesisir Jepara (173,761 Ha) 13. Karang Ombo (366,168 Ha) 14. Pulau Mandalika (39,543 Ha) 15. Pulau Sambangan, Pulau Seruni, Pulau Genting (962,47 Ha) 16. Pulau Morongan (210,262 Ha) 17. Pulau Gede (832,361 Ha) 18. Karang Gosong (197,115 Ha) (PERDA Prov. Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018)
DIY Yogyakarta		1. KKPD Gunungkidul (3.213,05 Ha) 2. KKPD Bantul (112,3453 Ha) 3. KKP3K Perbatasan – Sadeng (216,862 Ha) 4. KKP3K Sadeng - Tl. Gununggandul (163,595 Ha) 5. KKP3K Teluk Sembung - Pok Tunggal (127,839 Ha) 6. KKP3K Sarangan – Drini (99,4533 Ha) 7. KKP3K Watupayung (6,85345 Ha) 8. KKP3K Pantai Parangrancuk - Kayu Arum (40,7029 Ha) 9. KKP3K Pantai Kayu Arum – Torohudan (112,591 Ha) 10. KKP3K Tanjung Ngobaran (40,5579 Ha) 11. KKP3K Tanjung Butuh – Menteni (115,587 Ha) 12. KKP3K Tanjung Gesing – Wohkudu (170,988 Ha) 13. KKP3K Teluk Grigak - Tanjung Gununggembang (163,946 Ha) 14. KKP3K Pulau payung – Parangendog (487,201 Ha) 15. KKP3K Pantai Parangkusumo – Depok (133,318 Ha) 16. KKP3K KK Baros (131,102 Ha) 17. KKP3K Pandansimo - Kali Progo (148,851 Ha) 18. KKP3K Kadilangu (155,829 Ha)

Provinsi	Ditetapkan MPK	Dicadangkan
		(PERDA DIY Nomor 9 Tahun 2018)

3. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Luas daerah dan jumlah pulau menurut provinsi pada tahun 2016 berdasarkan data BPS (<https://www.bps.go.id/>) di wilayah kerja LPSPL Serang adalah seluas 152.605,72 km² dan terdapat sebanyak 1.984 pulau dengan panjang garis pantai total mencapai 85.588,38 Km. Selain itu berdasarkan keppres nomor 6 tahun 2017 menetapkan 111 pulau-pulau terluar di Indonesia dengan 9 (sembilan) diantaranya terdapat di wilayah kerja LPSPL Serang.

Tabel luas, garis pantai, dan pulau terluar provinsi LPSPL Serang

Provinsi	Luas (Km ²)	% Terhadap Luas Indonesia	Panjang Garis Pantai (Km)	Jumlah Pulau	Jumlah PPKT
Kepulauan Bangka Belitung	16.424,06	0,86	1.200,00	950	0
Bengkulu	19.919,33	1,04	525,00	47	2
Lampung	34.623,8	1,81	1.105,00	188	1
DKI Jakarta	664,01	0,03	81.000,00	218	0
Jawa Barat	35.377,76	1,85	354,00	131	2
Banten	9.662,92	0,50	499,62	131	3
Jawa Tengah	32.800,69	1,71	791,76	296	1
DI Yogyakarta	3.133,15	0,16	113,00	23	0
	152.605,72	7,96	85.588,38	1.984	9

4. Pemanfaatan Jasa Kelautan

- a. Potensi petambak garam di pantai utara pulau Jawa sangat baik untuk dilakukan integrasi lahan pergaraman. Telah dilakukan integrasi pada tahun 2019 di Kabupaten Serang.

- b. Potensi peningkatan produksi garam di pantai selatan pulau Jawa sangat baik untuk dilakukan system tunnel garam yang dapat menghasilkan garam untuk konsumsi atau biofarmakologi.
- c. Adanya kegiatan petambak garam di wilayah kerja LPSPL Serang membutuhkan peningkatan kualitas output garam dengan fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan garam berupa Washing Plant Garam.
- d. Potensi distributor dan pengolah garam di wilayah kerja LPSPL Serang yang telah berstandar nasional dengan jangkauan pasar regional.
- e. Terdapat potensi jenis biota yang dapat dimanfaatkan sebagai produk biofarmakologi berupa rumput laut, kuda laut dan teripang.
- f. Kawasan pesisir yang dapat didukung pengembangannya melalui Desa Wisata.

2. Permasalahan

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam atau akibat bencana. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang.

Pada saat ini, LPSPL Serang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan

kegiatannya. Isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplmentasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

- d. Masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.
- e. Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
- g. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
- h. Pemanfaatan ekonomi kelautan seperti pengelolaan produksi garam yang belum optimal. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu pemanfaatan ekonomi kelautan lainnya seperti biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, dan wisata bahari perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya.

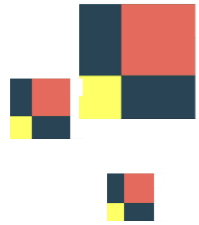
- i. Adanya kegiatan reklamasi yang membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak. Kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dibutuhkan peran pemerintah agar setiap tahapan kegiatan reklamasi dari awal pelaksanaan dan evaluasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal yang tercantum dalam analisis SWOT berikut ini.

Strength	Weakness
<ol style="list-style-type: none"> 1. potensi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil (mangrove, lamun, dan terumbu karang); 2. melimpahnya keanekaragaman hayati prioritas pengelolaan Kawasan Konservasi di wilayah kerja; 3. meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; 4. Dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan perencanaan ruang laut dan pengelolaan keanekaragaman hayati; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) perlu ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya; 2. pendataan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil belum maksimal; 3. data base pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum lengkap;
Opportunities	Threat
<ol style="list-style-type: none"> 4. posisi strategis wilayah kerja yang berada di jalur internasional; 5. potensi PNBK dari pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengelolaan ruang laut; 6. potensi peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan jasa ekosistem pesisir dan laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. degradasi dan kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. perubahan iklim yang menyebabkan kerentanan pesisir dan pulau-pulau kecil;

<p>secara berkelanjutan;</p> <ol style="list-style-type: none">7. perubahan struktur masyarakat digital termasuk kemudahan dan simplifikasi dalam berusaha;8. penyediaan sumberdaya manusia yang terampil dan profesional dalam menghadapi tantangan pengelolaan di WP3K;9. ruang kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;	<ol style="list-style-type: none">3. konflik kepentingan antar stakeholder dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;4. keberlanjutan pemanfaatan bantuan pemerintah di WP3K;
--	---



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”. Visi LPSPL Serang tidak terlepas dari Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Visi Presiden Tahun 2020–2024. Visi LPSPL Serang adalah “Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPSPL Serang menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;

2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi LPSPL Serang, maka, ditetapkan Misi LPSPL Serang sebagai berikut:

1. perencanaan ruang laut di lingkup wilayah LPSPL Serang;
2. pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Serang;
3. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di lingkup wilayah LPSPL Serang;
4. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja LPSPL Serang;
5. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup LPSPL Serang.

C. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, LPSPL Serang merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020–2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja LPSPL Serang dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Serang.
2. Misi pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Serang dengan tujuan:
 - a. meningkatkan pendayagunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Serang
 - b. meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Serang
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah LPSPL Serang dengan tujuan meningkatkan penataan dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja LPSPL Serang.
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja LPSPL Serang dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja LPSPL Serang.
5. Misi Peningkatan tata Kelola pemerintahan di LPSPL Serang dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi LPSPL Serang.

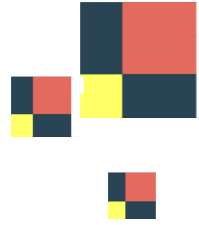
D. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah LPSPL Serang merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan LPSPL Serang Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- ii. Program Kualitas Lingkungan Hidup

1. tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja LPSPL Serang dengan sasaran kegiatan:
 - a. meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - b. meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - c. meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - d. meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja LPSPL Serang;
2. tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Serang dengan sasaran kegiatan:
 - a. meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - b. meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - c. meningkatnya ketangguhan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Serang;
- iii. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
3. tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Serang dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Serang;
4. tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja LPSPL Serang dengan sasaran kegiatan:

- a. terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - b. terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - c. terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - d. meningkatnya pengelolaan reklamasi di wilayah kerja LPSPL Serang.
5. tujuan meningkatkan pendayagunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Serang dengan sasaran kegiatan:
- a. meningkatnya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja LPSPL Serang;
 - b. meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja LPSPL Serang;
- iv. Program Dukungan Manajemen
6. tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi LPSPL Serang dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di LPSPL Serang.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, salah satunya adalah “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait”. Ditjen PRL sebagai salah satu unit eselon I Lingkup KKP telah merumuskan arah kebijakan tahun 2020–2024 yang memerlukan dukungan LPSPL Serang yaitu:

- 1) perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
- 2) pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
- 3) pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
- 4) pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) penataan dan pemanfaatan jasa kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
- 6) tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PRL.

B. Strategi Pelaksanaan Kegiatan LPSPL Serang

Strategi pelaksanaan kegiatan LPSPL Serang yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

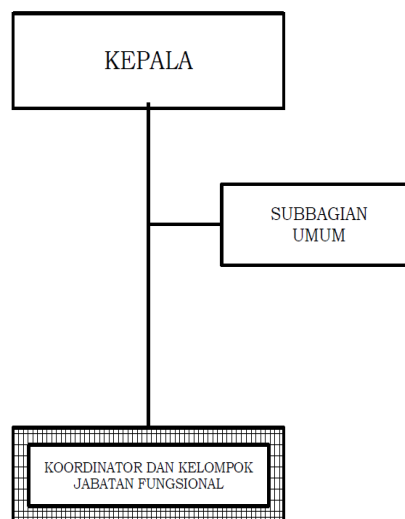
1. perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. pendampingan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - b. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - c. dukungan operasionalisasi KKPRL dan/atau intensif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - d. pengelolaan data KKPRL di wilayah kerja LPSPL Serang.
2. pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
 - a. pendampingan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - b. evaluasi efektivitas pengelolaan KKPD di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - c. penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - d. pemulihan populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - e. inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - f. rehabilitasi habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - g. penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - h. pelayanan perizinan/ peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - i. Inisiasi jejaring dan kerjasama konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - j. pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LPSPL Serang;

3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
 - a. identifikasi dan pendampingan bantuan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - b. dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja LPSPL Serang.
4. pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui:
 - a. identifikasi kawasan mangrove di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - b. penanaman Mangrove di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - c. pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan ekosistem Pesisir di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - d. identifikasi dan/atau fasilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dikendalikan pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - e. identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Serang;
5. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan melalui:
 - a. pembangunan sarana dan/atau prasarana sentra ekonomi garam rakyat di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - b. identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - c. fasilitasi pengembangan Desa Wisata Bahari di wilayah kerja LPSPL Serang;
 - d. identifikasi dan/atau verifikasi perizinan reklamasi di wilayah kerja LPSPL Serang.

6. tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PRL melalui:
 - a. pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di LPSPL Serang;
 - b. penguatan akuntabilitas Kinerja di LPSPL Serang;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan publik di LPSPL Serang;
 - d. pengelolaan keuangan, barang milik negara, pengadaan barang jasa dan umum di LPSPL Serang;

C. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi LPSPL Serang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana berikut:



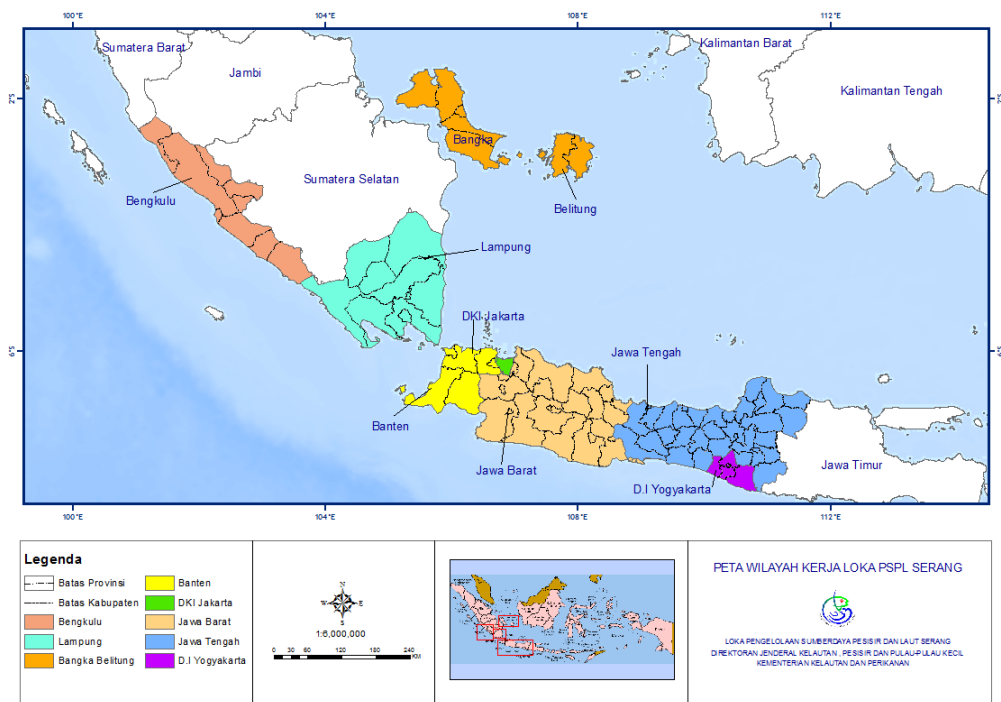
Struktur Organisasi LPSPL Serang

Total SDM yang dimiliki LPSPL Serang hingga tahun 2021 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 70 orang, yang terdiri dari 50 berstatus sebagai ASN, dan 20 Tenaga Kontrak. Komposisi SDM yang ada di LPSPL Serang pada saat penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan	Urusan Tata Usaha	Program dan Evaluasi	Pendayagunaan dan Pelestarian
JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN	2		

Nama Jabatan	Urusan Tata Usaha	Program dan Evaluasi	Pendayagunaan dan Pelestarian
JF Penata Laksana Barang	1		
JF Arsiparis	1		
Analisis Keuangan	2		
Pengelola Kepegawaian	1		
JF Perencana		1	
JF Analisis Anggaran		1	
Analisis Perencanaan		1	
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1	
JF PELP			20
Analisis Kelautan dan Perikanan	1		5
Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir			9
Analisis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			4
Total	8	4	38

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja diperlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM. Selain itu juga diperlukan penambahan jabatan fungsional lain yang ada di Direktorat Jenderal PRL, yaitu Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Jasa Kelautan, Jabatan Fungsional bidang perencanaan dan pentataan ruang laut serta Jabatan Fungsional lainnya.



Wilayah kerja Loka PSPL Serang

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka SDM tersebut ditempatkan pada 8 provinsi wilayah kerja LPSPL Serang, meliputi Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta. Total mencakup 113 Kabupaten/Kota yang tersebar di delapan Provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa.



Peninjauan pembibitan mangrove



BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja 2020-2024

Upaya Pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Ditjen PRL, maka LPSPL Serang telah menyusun kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan LPSPL Serang 2020–2024 dapat dilihat pada matriks:



Pelaksanaan kegiatan pembuatan stock center karang

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan LPSPL Serang 2020 - 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Serang	1	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja LPSPL Serang (Ha)	-	2.650	3.000	3.000	3.000
2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja LPSPL Serang	2	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Serang (Jenis)	2	5	5	5	5
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Serang	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Serang (Jenis)	3	3	3	3	3
4	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama	4	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di	1	4	3	3	3

	dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja LPSPL Serang		wilayah kerja LPSPL Serang (Kelompok)					
		5	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LPSPL Serang (Kesepakatan)	2	2	2	2	2
5	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Serang	6	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Serang (kawasan)	3	-	-	3	3
		7	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Serang (Kawasan)	4	10	-	1	1
		8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Serang (Kawasan)	-	-	-	1	1
6	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja LPSPL	9	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi dan /atau fasilitasi dalam rangka pengendalian pencemaran di wilayah kerja LPSPL Serang (kawasan)	-	-	-	1	1

	Serang							
7	Meningkatnya ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Serang	10	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi kerentanannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Serang (kawasan)	-	-	-	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
8	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Serang	11	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPR/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut LPSPL Serang (dokumen)	-	-	1	1	1
9	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja LPSPL Serang	12	Sarana dan/atau prasarana di Kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja LPSPL Serang (unit)	7	2	-	1	1
10	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja LPSPL Serang	13	Laporan Identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja LPSPL Serang (dokumen)	-	-	-	-	1

11	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja LPSPL Serang	14	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Serang (Kawasan)	-	-	-	1	1
12	Meningkatnya pengelolaan reklamasi di wilayah kerja LPSPL Serang	15	kawasan yang diidentifikasi dan/atau verifikasi perizinan reklamasi wilayah kerja LPSPL Serang (kawasan)	-	-	-	1	1
13	Meningkatnya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/ Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja LPSPL Serang	16	Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang difasilitasi sarana dan prasarananya di Wilayah kerja LPSPL Serang (lokasi)	-	-	-	-	1
15	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja LPSPL Serang	17	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja LPSPL Serang (pulau)	-	-	-	-	1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
16	Tatakelola pemerintahan yang	18	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah	-	72,5	75	77,5	80

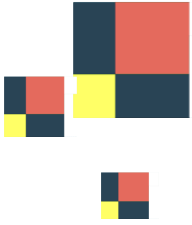
baik di LPSPL Serang		lingkup LPSPL Serang (%)					
	19	Indeks Profesionalitas ASN LPSPL Serang (indeks)	72	73	74	75	76
	20	Nilai WBK LPSPL Serang (Nilai)	75	75	78	78	80
	21	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPSPL Serang (%)	90	91	91	92	92
	22	Persentase unit kerja LPSPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
	23	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Serang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80
	24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPSPL Serang (Nilai)	88	89	89	90	90
	25	Nilai Kinerja Anggaran LPSPL Serang (Nilai)	85	86	87	88	89
	26	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK LPSPL Serang (%)	100	100	100	100	100

B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Kerangka indikasi pendanaan LPSPL Serang tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 135,12 Miliar. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan LPSPL Serang 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 serta dinamika kebijakan lainnya yang dapat muncul atau berubah pada kurun waktu 2020 - 2024.



BAB V

PENUTUP

Renstra LPSPL Serang tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan LPSPL Serang dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024 di wilayah kerja LPSPL Serang, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra LPSPL Serang tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

**MATRIK KERANGKA PENDANAAN LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SERANG 2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
TOTAL LPSPL SERANG						33,300	39,520	11,450	24,000	26,850	135,120	
Program Kualitas Lingkungan Hidup						11,530	22,660	2,450	8,700	9,950	55,290	
Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut						1,820	2,700	2,450	2,700	2,950	12,630	
	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Serang						0,320	0,200	0,130	0,300	0,350	1,300
	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja LPSPL Serang (Ha)	-	2.650	3.000	3.000	3.000						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja LPSPL Serang						0,250	0,570	0,470	0,500	0,600	2,390
	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja LPSPL Serang (Jenis)	2	5	5	5	5						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Serang						1,070	1,150	1,390	1,400	1,500	6,510
	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024
		(Rp. Miliar)										
	berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Serang (Jenis)											
	Meningkatnya jejaring, kemitraan/ Kerjasama dan konvensi konservasi dan keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja LPSPL Serang						0,180	0,780	0,480	0,500	0,500	2,440
	a. Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja LPSPL Serang (Kelompok)	1	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-
	b. Kesepakatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LPSPL Serang (Kesepakatan)	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							9,710	19,960	-	6,000	7,000	42,670
	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Serang						9,710	19,960	-	5,000	6,000	40,670
	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Serang (kawasan)	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Serang (Kawasan)	4	10	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja LPSPL Serang	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024
		(Rp. Miliar)										
	(Kawasan)											
	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya						-	-	-	0,500	0,500	1,000
	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi dan /atau difasilitasi dalam rangka pengendalian pencemaran di wilayah kerja LPSPL Serang (kawasan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Serang						-	-	-	0,500	0,500	1,000
	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi kerentanannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Serang (kawasan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							14,780	5,820	0,400	6,600	8,000	35,600
Perencanaan Ruang Laut							-	-	0,400	0,800	1,000	2,200
	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Serang						-	-	0,400	0,800	1,000	2,200

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024
		(Rp. Miliar)										
	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut LPSPL Serang (dokumen)	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							14,780	5,820	-	5,800	6,000	32,400
	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja LPSPL Serang						14,780	5,820	-	5,000	5,000	30,600
	Sarana dan/atau prasarana di Kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja LPSPL Serang (unit)	7	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja LPSPL Serang						-	-	-	-	0,200	0,200
	Laporan Identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja LPSPL Serang (dokumen)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja LPSPL Serang						-	-	-	0,400	0,400	0,800
	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja LPSPL Serang (Kawasan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya pengelolaan reklamasi di wilayah kerja LPSPL Serang						-	-	-	0,400	0,400	0,800

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
	kawasan yang diidentifikasi dan/atau verifikasi perizinan reklamasi wilayah kerja LPSPL Serang (kawasan)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil-							-	-	-	-	1,000	1,000
	Meningkatnya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/ Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja LPSPL Serang						-	-	-	-	0,500	0,500
	Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang difasilitasi sarana dan prasarananya di Wilayah kerja LPSPL Serang (lokasi)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja LPSPL Serang						-	-	-	-	0,500	0,500
	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja LPSPL Serang (pulau)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Program Dukungan Manajemen							6,990	11,040	8,600	8,700	8,900	44,230
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut							6,990	11,040	8,600	8,700	8,900	44,230
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di LPSPL Serang						6,990	11,040	8,600	8,700	8,900	44,230
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup LPSPL Serang (%)	-	72,5	75	77,5	80	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL 2020- 2024
		(Rp. Miliar)										
	Indeks Profesionalitas ASN LPSPL Serang (indeks)	72	73	74	75	76	-	-	-	-	-	-
	Nilai WBK LPSPL Serang (Nilai)	75	75	78	78	80	-	-	-	-	-	-
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPSPL Serang (%)	90	91	91	92	92	-	-	-	-	-	-
	Persentase unit kerja LPSPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90	-	-	-	-	-	-
	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Serang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80	-	-	-	-	-	-
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) LPSPL Serang (Nilai)	88	89	89	90	90	-	-	-	-	-	-
	Nilai Kinerja Anggaran LPSPL Serang (Nilai)	85	86	87	88	89	-	-	-	-	-	-
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK LPSPL Serang (%)	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/overhead lingkup LPSPL Serang (%)	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup LPSPL Serang (bulan)	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang